

**PENGARUH IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP  
FRAUD**

(Studi Kasus pada Itwasda Polda Metro Jaya)

***THE EFFECT OF INTERNAL CONTROL IMPLEMENTATION  
ON FRAUD***

*(Case Study at Itwasda Polda Metro Jaya)*

**Eddy Sarwono**

eddysarwonoo@yahoo.com

**Abstract.** *Internal control has been carried out by the top level leader of the Police in Republic of Indonesia to prevent the exposure of fraud. At the regional level organization of the Police (Polda), the supervision and internal control are carried out by the Regional Supervisory Inspectorate (Itwasda) which is responsible for the inspections on the general and treasures within the Polda including non-structural organization units under the supervision of the Regional Police. This research is aimed to reveal the effect of internal control implementation on fraud at Polda Metro Jaya. The research data was obtained by field survey through interview with the Irwasda of Polda Metro Jaya and distribute questionnaires to 15 members of Supervision Inspection and Region (Itwasda) at Polda Metro Jaya. Literature review was conducted to obtain relevant theories and previous researches. Descriptive and verificative analysis was performed to obtain solution to answer problems that have been identified previously. The result of this research shows that Polda Metro Jaya has a good internal control implementation, low fraud, and the significant effect of internal control implementation on fraud. This research gives suggestion that Polda Metro Jaya must improve the information and communication aspects of internal control, optimize monitoring in fraud aspect, and implement the internal control optimally to minimize fraud.*

**Keywords:** *Internal control, Fraud, Regional Police (Polda)*

**Abstrak.** Pengendalian internal secara berkala telah dilakukan oleh para pimpinan Polri untuk dapat mencegah *fraud*. Pada organisasi tingkat Polda, pengawasan dan pengendalian internal dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) yang bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda termasuk satuan – satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolda. Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh implementasi pengendalian internal terhadap *fraud* di Polda Metro Jaya. Data penelitian diperoleh dengan survei lapangan melalui wawancara dengan Irwasda Polda Metro Jaya dan distribusi kuesioner kepada 15 orang anggota Inspektorat Pengawasan dan Daerah (Itwasda) di Polda Metro Jaya. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis deskriptif dan verifikatif dilakukan untuk memperoleh jawaban atas masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengendalian internal di Polda Metro Jaya berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang sudah baik. *Fraud* di Polda Metro Jaya berada pada kategori cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari aspek struktur organisasi, kondisi keuangan, lingkungan organisasi dan bisnis, internal, Komite Audit,

*assessment symptom, red flags* dan peluang serta pelaporan masih cukup rendah. Implementasi pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud*. Saran yang diajukan adalah bahwa Polda Metro Jaya perlu meningkatkan aspek informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal, mengoptimalkan *monitoring* dalam aspek *fraud*, dan mengimplementasikan pengendalian internal dengan optimal untuk meminimalisir terjadinya *fraud*.

## **Kata kunci: Pengendalian internal, Fraud, Polda**

### **A. Pendahuluan**

Sejak era reformasi yang dimulai tahun 1998, bangsa Indonesia telah banyak mengalami perubahan penting di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pada perkembangannya, maka reformasi di bidang birokrasi pemerintahan mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi dan hukum. Sehingga pada tahun 2004, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang secara universal dijabarkan dalam prinsip-prinsip untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat<sup>1</sup>. Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dengan diterapkannya Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) yang diterapkan pada semua departemen dan lembaga pemerintahan termasuk Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Implementasi akuntabilitas pada Polri saat ini terus-menerus diupayakan agar dilaksanakan secara konsisten oleh semua jajaran aparaturnya.

Lahirnya undang-undang pemberantasan korupsi dan peraturan yang terkait telah meningkatkan tuntutan dan peran para pimpinan Polri, yang saat ini harus memandang *fraud* dan penyalahgunaan wewenang sebagai ancaman yang lebih besar. Mereka harus mampu mengarahkan penanganan permasalahan *fraud* secara lebih rinci dan dapat dioperasionalkan oleh pelaksana di lapangan. Pengendalian internal secara berkala yang dilakukan oleh para pucuk pimpinan Polri, akan menjadi tidak bermakna apabila *fraud* dalam skala besar terlambat diketahui terjadinya. Sementara itu pada organisasi tingkat Polda, pengawasan dan pengendalian internal dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) yang bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda termasuk satuan – satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolda.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1) bagaimana implementasi pengendalian internal di Polda Metro Jaya, 2) bagaimana *fraud* di Polda Metro Jaya dan 3) apakah implementasi pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* di Polda metro Jaya.

### **B. Landasan Teori**

Pengendalian internal ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam keandalan pelaporan

keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Mulyadi (2002) menyebutkan bahwa pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

COSO dalam Arens dan Beasley (2012:314) memperkenalkan adanya lima komponen pengendalian internal yang meliputi Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Risiko (*Risk Assessment*), Prosedur Pengendalian (*Control Procedure*), serta Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*), dan Pemantauan (*Monitoring*).

Pengendalian internal dilakukan demi tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum. Menurut Agoes Soekrisno (2004) tujuan dari pengendalian internal meliputi 3 poin yaitu: 1) Tujuan organisasi yang ditetapkan akan dapat dicapai, 2) Laporan keuangan yang dihasilkan organisasi dapat dipercaya, dan 3) Kegiatan organisasi sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui pengendalian aset, pengendalian manajemen, pengendalian biaya, pengendalian administrasi, dan pengendalian akuntansi. Akan tetapi, pengendalian-pengendalian tersebut tidak akan berjalan sesuai harapan jika tidak didasari dengan kepemimpinan dan budaya/etika, regulasi, kebijakan, dan tata kelola yang *anti-fraud*.

*Fraud* diterjemahkan dengan *kecurangan* sesuai Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, demikian pula *error* dan *irregularities* masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32. *Fraud* meliputi serangkaian penyimpangan dan tindakan melawan hukum yang memiliki karakteristik adanya niat untuk melakukan penipuan dan biasanya termasuk didalamnya kesengajaan untuk menyembunyikan fakta. Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan *fraud*. Dengan mengetahui, mengenal, dan memahami faktor-faktor tersebut dalam suatu lingkungan yang diaudit, dapat membantu seorang auditor untuk melaksanakan lebih baik tugasnya mengungkap *fraud*. Faktor-faktor tersebut adalah lingkungan kerja, tekanan dan stres, pengaruh perilaku, kebijakan organisasi, dan pertimbangan geografis. Indikasi terjadinya *fraud* dapat dilihat melalui beberapa indikator, diantaranya menurut dimensi yang digunakan oleh Tommie dan Aaron (2010) melalui aspek identifikasi *symptom and redflags*, identifikasi peluang, *assessment symptom, red flags* dan peluang, pelaporan serta *monitoring*.

Mulfrod dan Comiskey (2002) memberikan beberapa atribut yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya risiko terdapat *fraud* di perusahaan, antara lain terdapat kelemahan dalam pengendalian internal (*internal control*), perusahaan tidak memiliki komite audit dan terdapat hubungan kekeluargaan (*family relationship*) antara manajemen (*director*) dengan karyawan perusahaan. Salah satu cara untuk mencegah timbulnya *fraud* adalah dengan merancang sebuah sistem yang dilengkapi dengan *internal control* yang cukup memadai sehingga *fraud* sukar dilakukan oleh pihak luar maupun orang dalam perusahaan.

## 2.1 Gambaran Pengendalian Internal

Pengendalian ointernal adalah seluruh kebijakan dan prosedur yang diciptakan untuk memberikan jaminan yang masuk akal agar tujuan organisasi (*entity*) dapat tercapai. Pengertian pengendalian internal menurut AICPA (*American Institute of*

*Certified Public Accountants*) yang dikutip oleh Bambang Hartadi (2003) menyebutkan, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, semua metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian, dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya. Tujuan pengendalian internal adalah untuk menciptakan laporan keuangan yang dapat dipercaya, menghasilkan keefektifan dalam operasional, efektif dan efisien dalam operasional dan dapat diterapkan peraturan dan hukum yang berlaku secara konsisten guna menjaga kekayaan perusahaan, menciptakan keakuratan dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi guna mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu. Suatu sistem terdiri dari sub sistem dan unsur pembentuk sistem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan bahkan mungkin saling mempengaruhi.

Adapun unsur-unsur pembentuk pengendalian internal menurut COSO dalam Arens dan Beasley (2012:314-321) sebagai berikut:

1. *The control environment* (lingkungan pengendalian)  
Lingkungan pengendalian meliputi tindakan, kebijakan dan prosedur yang berdampak terhadap seluruh kegiatan manajemen puncak, direktur dan pemilik dari entitas pengendalian internal dan hal tersebut sangat penting. Untuk memahami lingkungan pengendalian auditor harus menyadari sub komponen yang paling penting dari pengendalian.
2. *Risk assessment* (penilaian risiko)  
Penilaian risiko untuk laporan keuangan merupakan identifikasi dan analisis dari risiko yang relevan terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi.
3. *Control activities* (kegiatan pengendalian)  
Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur, sebagai tambahan dari empat komponen pengendalian lainnya yang ditujukan untuk membantu meyakinkan tujuan entitas yang ingin dicapai
4. *Information and communication* (informasi dan komunikasi)  
Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi adalah proses untuk merekam pelaporan transaksi dan untuk memelihara akuntabilitas untuk aset yang berhubungan. Sistem informasi dan komunikasi memiliki beberapa komponen, secara khusus untuk membuat kelas-kelas transaksi seperti penjualan, pengembalian, penerimaan tunai, akuisisi dan lainnya.
5. *Monitoring* (pemantauan)  
Aktivitas pemantauan berkaitan dengan penilaian secara periodik dari kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksudkan telah dimodifikasi sesuai dengan perubahan lingkungan.

Mulyadi (2008) menyatakan bahwa untuk menciptakan sistem pengendalian internal yang baik dalam perusahaan maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi antara lain struktur organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan, praktik yang sehat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Sistem pengendalian internal yang memadai bagi perusahaan mempunyai persyaratan yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

## 2.2 **Gambaran *Fraud***

*Fraud* diterjemahkan dengan *kecurangan* sesuai Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 70, demikian pula *error* dan *irregularities* masing-masing diterjemahkan

sebagai *kekeliruan* dan *ketidakberesan* sesuai PSA sebelumnya yaitu PSA No. 32. Menurut standar pengauditan, faktor yang membedakan kecurangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, yang berakibat terjadinya salah saji dalam laporan keuangan, berupa tindakan yang sengaja atau tidak disengaja (IAI, 2001). Pengelolaan risiko terjadinya *fraud* dan pencegahannya adalah tanggung jawab dari pimpinan di bidang operasional. Teknik-teknik pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal, apabila ditaati dengan sebaik-baiknya, akan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Indikasi terjadinya *fraud* dapat dilihat melalui beberapa indikator, diantaranya menurut dimensi yang digunakan oleh Tommie dan Aaron (2010) melalui aspek *identifikasi symptom and redflags*, identifikasi peluang, *assessment symptom, red flags* dan peluang, pelaporan serta *monitoring*. Internal audit mendukung pimpinan bidang operasional dengan memberikan saran dan melakukan penilaian atas memadai tidaknya teknik-teknik pengelolalaan risiko serta mengenai memadai tidaknya sistem internal control yang ada.

### 2.3 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap *Fraud*

Auditor internal harus membuat kesepakatan dengan manajemen agar mereka diberi tahu jika timbul dugaan adanya *fraud*. Dengan begitu auditor dapat melakukan penilaian atas implikasi *fraud* yang diduga tersebut terhadap sistem pengelolaan risiko, pengendalian internal dan cara-cara pengelolaan yang baik pada umumnya. Adalah menjadi tanggung jawab auditor internal untuk memberikan pendapat mengenai perlu tidaknya dilakukan perbaikan pada sistem-sistem yang ada atau perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut.

Dengan prosedur audit saja, walaupun telah dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan secara profesional sekalipun, tidak akan dapat menjamin terungkapnya suatu kecurangan. Namun demikian, auditor internal diharapkan agar proaktif dalam setiap pemeriksaannya untuk mengenali adanya tanda-tanda risiko dan hal-hal yang rawan yang memungkinkan terjadinya *fraud* atau adanya indikasi telah terjadi suatu *fraud*.

Manajemen bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara sistem pengendalian internal yang akan membantu pencegahan terjadinya *fraud*. Auditor internal harus selalu waspada akan kemungkinan adanya *fraud* pada saat merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan dan harus melakukan tindakan yang tepat apabila terjadi dugaan adanya suatu *fraud*. Auditor internal terutama bertanggung jawab untuk membuat perencanaan pemeriksaan yang dapat memberikan jaminan secara wajar bahwa *fraud* akan terungkap apabila itu terjadi, melaksanakan langkah yang tepat selama melakukan pemeriksaan agar tidak mengacaukan upaya investigasi di kemudian hari, dan melaporkan segera adanya potensi *fraud* apabila itu terungkap. Berdasarkan uraian di atas dirumuskan hipotesis berikut:

**H<sub>1</sub> :Terdapat pengaruh implementasi pengendalian internal terhadap *fraud* di Polda Metro Jaya**

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian sensus. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2006:72). Apabila seseorang ingin meneliti semua yang ada dalam wilayah penelitian maka penelitiannya merupakan populasi studi atau juga disebut populasi studi

sensus. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Dodge (2000) bahwa: sensus merupakan pencacahan yang lengkap dari suatu populasi atau kelompok dalam saat yang ditentukan dan memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan dengan baik. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Inspektorat Pengawasan dan Daerah (Itwasda) di Polda Metro Jaya yang berjumlah 15 orang. Adapun populasi dapat dilihat dalam Tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Populasi Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah
1.	Irwasda	1 orang
2.	Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subagrenmin)	4 orang
3.	Subbagian Pengaduan Masyarakat dan Analisis (Subagdumasan)	3 orang
4.	Inspektorat Bidang Operasional (Itbidops)	3 orang
5.	Inspektorat Bidang Pembinaan (Itbidbin)	4 orang
	Jumlah	15 orang

Sumber : Polda Metro Jaya, 2012

Menurut Sugiyono (2008) berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung yang dikumpulkan melalui survei lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data tertentu yang dibuat secara khusus untuk itu. Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Sekaran, 2000; Kuncoro, 2003; Zikmund, 2000).

Dalam penelitian sumber data primer diperoleh dari melalui angket yang berisi pertanyaan/kuesioner mengenai variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui teknik wawancara dengan Irwasda Polda Metro Jaya dan studi kepustakaan baik melalui sumber bacaan yang menunjang terhadap variabel yang diteliti.

## **D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### **Gambaran Pengendalian Internal di Polda Metro Jaya**

Pengendalian internal adalah rencana, metoda, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain. Dalam penelitian ini implementasi pengendalian internal di Polda Metro Jaya diuraikan menjadi 5 dimensi yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Tanggapan Itwasda terhadap implementasi pengendalian internal di Polda Metro Jaya ditunjukkan pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap Pengendalian Internal**  
**di Polda Metro Jaya**

	Dimensi dan Indikator	Skor	Rata-rata
<i>Lingkungan Pengendalian</i>			
1	Kesesuaian organisasi dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja/satker	51	
2	Kesesuaian antara mekanisme, alur kerja dengan tanggung jawab	51	
3	Kejelasan rentang kendali pimpinan dalam organisasi	53	
4	Kejelasan definisi wewenang dan pendelegasiannya	55	
5	Adanya Seleksi kompetensi personil dalam menduduki jabatan	53	
6	Ketepatan pengisian personil dalam organisasi	45	
7	Kejelasan prosedur tertulis (SOP) yang ditetapkan oleh pimpinan di unit kerja / satker	56	
8	Kesesuaian prosedur dengan kebutuhan organisasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan tupoksi unit kerja	54	
9	Efektivitas prosedur sebagai acuan kerja	49	
10	Pimpinan melakukan evaluasi secara berkala dan berjenjang terhadap prosedur yang ada	60	
11	Saranan penegakan integritas/nilai etika di unit kerja/satker dan seluruh pejabat struktural telah menyampaikan data kekayaan	48	
12	Pimpinan menerapkan kompetensi SDM dalam organisasi di Unit kerja/satker	51	
13	Keefektifan penerapan sistem pendelagasian wewenang/tanggung jawab dalam melaksanakan roda organisasi	37	
14	Pembinaan karir/pola karir pegawai pada unit kerja/satker	47	
15	Penetapan sistem DIKLAT bagi pegawai guna meningkatkan kemampuan/profesionalisme	46	
16	Penetapan kompetensi pegawai, mulai dari mekanisme penerimaan sampai dengan pengkajian kinerja pegawai	49	
17	Pemantauan terhadap penguasaan/implementasi uraian tugas masing-masing personil	51	
18	Penetapan personil yang mengelola keuangan berdasarkan kompetensinya	61	
19	Kesesuaian kebijakan dengan tujuan/sasaran yang telah ditetapkan	54	
20	Sosialisasi kebijakan kepada personil di unit kerja	54	
21	Ketepatan penggunaan perangkat kerja pendukung dalam pelaksanaan kebijakan	48	
22	Ketepatan penggunaan kebijakan sebagai pedoman/acuan pelaksanaan program kegiatan	49	
	<b>Sub total</b>	<b>1122</b>	<b>51</b>

	<b>Dimensi dan Indikator</b>	<b>Skor</b>	<b>Rata-rata</b>
<i>Penilaian Resiko</i>			
23	Ketersediaan TOR pada setiap kegiatan	472	
24	Kesesuaian setiap TOR dengan tujuan dan kegiatan yang selaras dengan Renstra	469	
25	Ketersediaan indikator keberhasilan pada setiap kegiatan	483	
26	Penetapan titik kritis dari tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap TOR yang merupakan aktivitas yang paling dominan dalam pencapaian tujuan	490	
27	Penetapan risiko terhadap titik kritis tahapan kegiatan	495	
28	Pemenuhan unsur kejadian kemungkinan dan kerugian yang ditimbulkan dari risiko yang telah ditetapkan	495	
<b>Sub total</b>		<b>307</b>	<b>51,17</b>
<i>Prosedur Pengendalian</i>			
29	Keefektifan kegiatan pengendalian sebagai acuan kegiatan di unit kerja/satker	49	
30	Keefektifan pemantauan/evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian	48	
31	Keefektifan pelaksanaan review atas kinerja dan unit kerja/satker secara berkala dan berkelanjutan	52	
32	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, seperti pembatasan akses berdasarkan tanggung jawab	53	
33	pengendalian terhadap akurasi pemrosesan data	48	
34	Pengendalian aplikasi yang dilakukan oleh pimpinan seperti pengendalian otorisasi, pengesahan dokumen sumber, serta pengendalian fisik dan keuangan di unit kerja	55	
<b>Sub total</b>		<b>305</b>	<b>50,83</b>
<i>Informasi dan Komunikasi</i>			
35	Penyusunan informasi menggunakan KAK/TOR yang dibuat khusus untuk masing-masing pemantauan yang dilakukan	51	
36	Pengelolaan informasi menggunakan perangkat daftar periksa (check list), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan	50	
37	Pengelola informasi telah menggunakan kriteria atau persyaratan yang tepat sebagai dasar pelaksanaan pemantauan	51	
38	Pengelolaan informasi dilaksanakan secara periodeik sesuai tahapan kegiatan atau jadwal waktu yang ditetapkan	49	
39	Pengelolaan informasi dilakukan oleh para personil yang kompeten	49	
40	Hasil pengelolaan informasi dilaporkan tepat waktu kepada pimpinan	49	
41	Hasil pengelolaan informasi dilaporkan tepat waktu kepada pimpinan	49	
42	Pengelolaan komunikasi telah sesuai SOP untuk masing-masing kegiatan	54	
43	Ruang lingkup informasi/komunikasi didasarkan atas hasil penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan	50	
44	Frekuensi informasi/komunikasi didasarkan atas hasil penilaian risiko dan pemantauan berkelanjutan	48	
<b>Sub total</b>		<b>500</b>	<b>50</b>



	Dimensi dan Indikator	Skor	Rata-rata
<i>Pemantauan</i>			
	Pemantauan telah menggunakan kriteria atau persyaratan yang tepat sebagai dasar pelaksanaan pemantauan	53	
46	Ruang lingkup dan frekuensi pemantauan telah mencakup pengendalian intern, keuangan, aset negara, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dengan memperhatikan/mempertimbangkan tahap kegiatan yang dipantau	52	
47	Pemantauan dilakukan dengan menganalisis hasil pemantauan dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditetapkan	49	
<b>Sub total</b>		<b>154</b>	<b>51,33</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2388</b>	

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2012

Jumlah skor hasil pengumpulan data variabel Implementasi pengendalian internal adalah 2388 (Tabel 2), maka 15 responden yang merupakan anggota Itwasda di Polda Metro Jaya menilai implementasi pengendalian internal adalah  $2388/3525 \times 100 = 67,75\%$  dari kriteria yang ditetapkan. Hal ini berarti 67,75% dari responden menyatakan bahwa tingkat implementasi pengendalian internal di Polda Metro Jaya dilihat dari aspek lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan sudah baik.

### Gambaran *Fraud* di Polda Metro Jaya

*Fraud* merupakan suatu istilah yang secara umum diartikan sebagai kecurangan atau penipuan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara material maupun non-material. *Collins English Dictionary* menyebutkan bahwa *fraud* adalah suatu kecurangan, tipu daya, pelanggaran kerahasiaan, dan memperoleh keuntungan secara tidak jujur. *Fraud* adalah perilaku yang disengaja atau ceroboh, baik dengan tindakan atau penghapusan. Dalam penelitian ini *fraud* diuraikan menjadi 5 dimensi yaitu identifikasi *symptom* and *redflags*, identifikasi peluang, *assessment symptom*, *redflags* dan peluang, pelaporan serta *monitoring*.

**Tabel 3**  
**Rekapitulasi Skor Tanggapan Responden Terhadap *Fraud* di Polda Metro Jaya**

No.	Dimensi dan Indikator	Skor	Rata-rata
<i>Identifikasi Symptom and Redflags</i>			
<b>Struktur Organisasi</b>			
1	Pimpinan yang tidak efektif	32	
2	Seringnya terjadi perubahan keorganisasian	32	
3	Perubahan besar dan terdesentralisasi	42	
<b>Sub total</b>		<b>106</b>	<b>35,33</b>
<b>Identifikasi Peluang</b>			
<b>Lemahnya Pengendalian Internal</b>			
4	Operasi organisasi tidak efektif dan efisien	40	
5	Aturan dan kebijakan tidak dipatuhi	37	
6	Asset organisasi tidak terlindungi	37	
7	Pelaporan keuangan tidak dapat diandalkan	39	
<b>Sub total</b>		<b>153</b>	<b>38,25</b>

No.	Dimensi dan Indikator	Skor	Rata-rata
<b>Assesment symptom, RedFlags dan Peluang</b>			
18	Berdasarkan peluang dan <i>symptoms</i> yang telah teridentifikasi, apakah Anda mampu mendeteksi adanya <i>Fraud</i> yang dilakukan oleh manajemen	32	
19	Anda memiliki kemampuan dan kebebasan untuk menginvestigasi terjadinya <i>Fraud</i>	29	
110	Anda memiliki kemampuan dan kebebasan untuk menentukan tindakan yang dianggap perlu untuk mendeteksi terjadinya <i>Fraud</i> dengan menempuh empat prosedur analitis, yaitu: (1) Analisis horizontal; (2) Analisis Vertikal; (3) <i>Operating ratios</i> , dan (4) <i>Customized ratios</i>	30	
211	Melalui prosedur analitis Anda menemukan bukti bahwa terjadi <i>Fraud</i>	27	
<b>Sub total</b>		<b>118</b>	<b>29,5</b>

No.	Dimensi dan Indikator	Skor	Rata-rata
<b>Pelaporan</b>			
212	Anda memiliki kebebasan untuk melaporkan temuan terjadinya <i>Fraud</i> kepada pihak manajemen yang tidak terlibat dan atau kepada komite audit	34	
213	Anda memiliki kebebasan untuk melaporkan temuan terjadinya <i>Fraud</i> kepada auditor eksternal dan atau media	32	
		66	<b>33</b>
<b>Monitoring</b>			
14	Kesesuaian monitoring dengan criteria	42	
15	Ruang lingkup monitoring	41	
16	Frekuensi monitoring	43	
<b>Sub total</b>		<b>126</b>	<b>42</b>
<b>TOTAL</b>		<b>569</b>	

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2012

Jumlah skor hasil pengumpulan data variabel *Fraud* adalah 569 (Tabel 3), maka penilaian 15 responden yang merupakan anggota Itwasda Polda Metro Jaya terhadap *Fraud* adalah  $569/1200 \times 100 = 47,42\%$  dari kriteria yang ditetapkan. Hal ini berarti 47,42% dari responden menyatakan bahwa *Fraud* di lingkungan Polda Metro Jaya dilihat dari aspek identifikasi *symptom* dan *redflags*, identifikasi peluang, *assessment symptom*, *red flags* dan peluang serta pelaporan **cukup rendah**.

## Pengaruh Implementasi Pengendalian Internal terhadap Fraud di Polda Metro Jaya

Berdasarkan hasil analisis data, maka diperoleh bahwa implementasi pengendalian internal dan *fraud* memiliki hubungan, dimana nilai korelasi ( $r$ ) adalah sebesar 0,639 (negatif). Hal ini berarti bahwa implementasi pengendalian internal dengan *fraud* mempunyai korelasi dalam kategori cukup kuat. Hal ini terbukti dengan hasil perhitungan koefisien determinasi yaitu dengan mengkuadratkan koefisien korelasi  $r^2 \times 100\% = (-0,639)^2 \times 100\%$  diperoleh hasil sebesar 40,8% yang berarti bahwa perubahan variabel *fraud* sebesar 40,8% dipengaruhi oleh implementasi pengendalian internal. Sedangkan 59,2% *fraud* dipengaruhi oleh faktor lain.

Pengujian hipotesis pengaruh implementasi pengendalian internal terhadap *fraud* dilakukan secara keseluruhan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  perhitungan uji signifikansi dengan menggunakan  $\alpha$  0,05 pada uji satu pihak dengan derajat kebebasan dengan taraf kesalahan 5% diperoleh nilai  $t_{tabel}$  sebesar 4,60. Berdasarkan ketentuan hipotesis diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka diketahui bahwa harga  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $8,950 > 4,60$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa antara variabel implementasi pengendalian internal dan *fraud* memiliki pengaruh dan yang signifikan.

Pernyataan tersebut diperoleh melalui pengujian hipotesis yang menggunakan metode regresi linier sederhana, regresi tersebut ditunjukkan dengan perolehan pencegahan *fraud* sebesar 80,415 dimana hasil tersebut dapat diartikan bila nilai setiap penambahan 1% pengendalian internal akan menurunkan *fraud* yaitu sebesar 80,415 dikurangi 0,191 dari pengendalian internal ( $Y = 80,415 + (-0,191)X$ ), dimana koefisien determinasi ( $r^2$ ) yaitu 0,408 termasuk kategori cukup tinggi atau cukup kuat berada diantara (0,400–0,599).

Koefisien korelasi yang bernilai negatif menunjukkan implementasi pengendalian internal memiliki korelasi yang negatif dengan *fraud*, artinya jika implementasi pengendalian internal ditingkatkan maka dapat diprediksi bahwa *fraud* akan semakin menurun. Namun, sebaliknya jika implementasi pengendalian internal semakin buruk akan berdampak pada tingginya *fraud*. Implementasi pengendalian internal yang dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya bertujuan untuk mencegah terjadinya *fraud*, dan hal ini berarti dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nama baik bagi Polda Metro Jaya.

Pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan Polda, dilaksanakan oleh Itwasda yang bertugas membantu Kapolda dalam menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dalam lingkungan Polda, termasuk satuan-satuan organisasi non struktural di bawah kendali Kapolda,.

Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Kapolri. No Pol: KEP/97/XII/2003 tanggal 13 Desember 2003 tentang Naskah Peraturan Irwasum tentang hubungan dan tata cara kerja di lingkungan Irwasum Polri. Sementara itu pada organisasi tingkat Polda, pengawasan dan pengendalian internal dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Irwasda) yang bertugas menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda termasuk satuan-satuan organisasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolda.

### E. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pengendalian internal di Polda Metro Jaya berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi serta pemantauan yang sudah baik.
2. *Fraud* di Polda Metro Jaya berada pada kategori cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari aspek struktur organisasi, kondisi keuangan, lingkungan organisasi dan bisnis, intenal, Komite Audit, *assessment symptom*, *red flags* dan peluang serta pelaporan masih cukup rendah.
3. Implementasi pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud*.

Dari simpulan di atas, maka saran yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Aspek informasi dan komunikasi di Polda Metro Jaya dinilai sebagai aspek paling rendah dalam pengendalian internal. Maka Polda Metro Jaya harus meningkatkan dan memperbaiki cara dalam penyusunan informasi dengan mengoptimalkan menggunakan RAK/TOR yang dibuat khusus untuk masing-masing pemantauan yang dilakukan, menggunakan perangkat daftar periksa (*check list*), daftar kuesioner, atau perangkat lainnya yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan oleh anggota yang kompeten, dan dilaporkan secara tepat waktu. Aspek pemantauan yang dinilai paling tinggi menjadi salah satu aspek yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam pengendalian internal di Polda Metro Jaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
2. Aspek *fraud* yang dinilai paling tinggi adalah *monitoring*, terutama dari kesesuaian *monitoring* dengan kriteria, ruang lingkup *monitoring* dan frekuensi *monitoring*. Hal ini harus menjadi catatan penting bagi Polda Metro Jaya dalam mengoptimalkan *monitoring* sehingga optimalisasi pengendalian internal melalui berbagai segi tersebut akan mampu untuk mendeteksi terjadinya *Fraud* di Polda Metro Jaya
3. Implementasi pengendalian internal harus selalu dilakukan secara optimal dan didukung oleh sarana dan prasarana dalam upaya meminimalisir terjadinya *fraud*.

## F. Daftar Pustaka

- ACFE, 2000, *Fraud Examiners Manual*, Third Edition.
- Agoes, Soekrisno, 2004, *Auditing*, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder dan Mark S. Beasley, 2012, *Auditing and Assurance Services*, Fouteenth Edition, Pearson.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Bina Aksara, Yogyakarta.
- Beasley, M, J. V. Carcello, dan P. Lapides, 2000. Fraudulent Financial Reporting: Consideration of Industry Traits and Corporate Governance Mechanisms, *The CPA Journal*.
- BPK RI, 2012, *BPK dan Polri Bahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan*, 14 Desember 2012, <http://www.bpk.go.id/web>
- Bryan, K., McMillan, Jeffrey J., dan Schneider, Arnold, 2001, Reporting during Analytical Procedures, *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, Vol. 20, No. 1
- Cambell, Hendry Cambell, 1990, *Black Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing. Co.

- Colbert, Janet L. dan C. Wayne Alderman, 1998. The Internal Auditor's Responsibility for Fraud, *The CPA Journal*.
- Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO), 1999, *Internal Control Integrated Framework*, AICPA Publication, USA.
- Davis, James R., Alderman, Wayne C., dan Robinson, Leonard A., 1990. *Accounting Informaation System : A Cycle Approach*, 3th Edition, John Wiley and Sons, New York,.
- Effendi, Taufiq, 2007, *Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good Governance*, Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Gujarati, Damodar, 2006, *Dasar-Dasar Ekonometrika*, Erlangga, Jakarta.
- Hartadi, Bambang, 2003, *Sistem Pengendalian Internal dalam Hubungannya dengan Manajemen dan Audit*, Edisi ketiga, Cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2001, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kerlinger, Fred N. dan Pedhazur E.J., 1973, *Multiple Regression in Behavioral Research*, New York, Holt Rinerhart & Winston Inc.
- Malhotra, Naresh K, 2005, *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataaan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Montgomery, DC. dan Hines, W.W, 1990, *Probabity dan Statistika dalam Ilmu Rekayasa dan Manajemen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mulfrod dan Comiskey, 2002, *The Financial Numbers*.
- Mulyadi, 2002, *Sistem Akuntansi*, cetakan keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Nazir, M., 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sekaran, Uma. 2010. *Research Methods For Business*. Third Edition. John Wiley & Sons, Inc., New York.
- Strawser, 2001, *Auditing: Theory and Practice*, Ninth Edition, Thompson Learning.
- Sugiono, 2008, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Tommie, W., Singelton, Aaron J, G. Jack Bologna, dan Robert J. Lindquist., 2010. *Fraud Auditing & Forensic Auditing*. Willey & Sons, Inc.
- Tuanakota, Theodorus M., 2006, *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Jakarta, FEUI.
- Umar, Husein, 2005, *Metode Penelitian*, Jakarta, Salemba Empat.
- Wilopo, 2006, Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia, *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) 9*, Padang, 23 – 26 Agustus 2006.